

BAB III

KONFLIK SIPIL DI SURIAH DAN RESOLUSI KONFLIK YANG TELAH DIBUAT

Konflik sipil merupakan suatu kekerasan yang terjadi di suatu negara antara pemerintah negara dengan satu atau lebih kelompok oposisi (Gleditsch, 2017). Dalam terjadinya konflik sipil seringkali melibatkan persenjataan dan kekerasan yang menyebabkan banyak korban yang berjatuh. Konflik sipil juga menjadi perhatian dunia internasional, khususnya konflik sipil yang terjadi di Suriah. Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut semakin membesar dan melibatkan pihak-pihak di dunia internasional yang memiliki tujuan untuk membantu masing-masing pihak yang sedang berkonflik.

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang awal mula konflik sipil di Suriah terjadi dan resolusi konflik yang telah dibuat sebagai langkah untuk menghentikan konflik tersebut.

A. Awal Mula Konflik Sipil di Suriah

Suriah merupakan salah satu negara yang mengalami dampak dari *Arab Spring* atau serangkaian gelombang protes terhadap rezim pemerintahan yang terjadi di Timur Tengah (BBC Indonesia, 2018). Di Suriah protes oleh rakyat pertama kali terjadi pada tahun 2011 dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad. Protes tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah dengan masalah ekonomi yang melanda Suriah seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan korupsi yang meluas. Selain itu gaya kepemimpinan Bashar Al-Assad yang cenderung otoriter dan menekan kebebasan politik para rakyat Suriah menambah alasan dibalik protes tersebut.

Protes dimulai pada bulan Maret 2011 dengan aksi beberapa remaja di Kota Daraa yang membuat gambar grafiti berbau politik. Hal tersebut menyebabkan pasukan

keamanan melakukan serangan untuk menghentikan aksi protes tersebut. Serangan yang dilakukan oleh petugas keamanan tersebut membuat rakyat Suriah melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan bagi sekelompok remaja tersebut.

Untuk merespon tindakan protes yang dilakukan oleh rakyatnya, Pemerintah Suriah melakukan beberapa rencana untuk meredam amarah rakyat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai negeri menerima kenaikan gaji. Selain itu Pemerintah mempelajari pencabutan undang-undang darurat Suriah yang telah berlaku serta perizinan partai-partai baru. Assad juga mengatakan bahwa walaupun Pemerintah belum dapat memenuhi keinginan rakyat Suriah namun tidak ada perubahan yang terjadi (BBC Indonesia, 2018).

Di tahun yang sama Bashar Al-Assad masih terus mencoba untuk menghentikan protes-protes rakyat. Namun konflik sipil yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir. Hal ini membuat banyak respon yang diberikan oleh negara-negara di dunia internasional. Berbagai tekanan untuk rezim Bashar Al-Assad datang dari berbagai negara dan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan konflik sipil yang terjadi.

Namun pada bulan April 2011, Bashar Al-Assad menetapkan keadaan darurat bagi negara Suriah. Ia juga membuat keputusan untuk mengatur hak melakukan protes secara damai bagi rakyat Suriah sebagai salah satu dasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Suriah. Konflik sipil di Suriah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir. Hal ini menyebabkan pihak luar yaitu Amerika Serikat melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi terhadap Bashar Al-Assad dan enam pejabat senior Suriah. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat berupa pemblokiran transaksi semua properti baik milik individu warga Amerika

Serikat ataupun yang berada dibawah kontrol warga Amerika Serikat yang ada di Suriah (BBC Indonesia, 2018).

Setelah adanya sanksi pemblokiran tersebut, Amerika Serikat pada bulan Agustus menambahkan sanksi terhadap Suriah sebagai bentuk protes bagi tindakan pemerintahan Suriah dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad yang otoriter terhadap rakyatnya. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap pemerintah Suriah berupa pembekuan aset Pemerintah Suriah yang berada di Amerika Serikat. Selain itu Pemerintah Amerika Serikat melarang rakyatnya untuk melakukan investasi di Suriah serta larangan untuk melakukan segala macam transaksi yang terkait dengan produk minyak milik Suriah (BBC Indonesia, 2018).

Reaksi terhadap konflik sipil di Suriah datang dari berbagai pihak selain Amerika Serikat. Pada bulan September 2011, Uni Eropa menjadi pihak selanjutnya yang memberikan respon berupa sanksi terhadap pemerintah Suriah. Uni Eropa juga memberikan sanksi ekonomi pemberlakuan larangan untuk mengimpor minyak dari Suriah. Selain itu Uni Eropa juga memberikan sanksi tambahan untuk merespon tindakan brutal oleh Pemerintah Suriah kepada rakyatnya.

Pada bulan Oktober 2011 terbentuk Dewan Nasional Suriah yang berasal dari kelompok oposisi. Lembaga tersebut dibentuk untuk mengakhiri masa pemerintahan Bashar Al-Assad dan membangun sistem demokrasi di Suriah. Pada bulan yang sama Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat resolusi terhadap tindakan kekerasan di Suriah. Namun Rusia dan Cina mengeluarkan hak veto untuk menolak resolusi tersebut.

Respon dunia internasional terhadap konflik sipil di Suriah berlanjut dengan Liga Arab yang menanggukkan keanggotaan Suriah di Organisasi tersebut. Selain itu

Menteri Luar Negeri dari 19 negara anggota Liga Arab mengambil keputusan untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Pemerintah Suriah atas tindakan kekerasan yang memakan korban masyarakat sipil. Setelah Liga Arab, Turki menjadi negara yang memberikan sanksi keuangan terhadap Suriah (Gleditsch, 2017).

Akhirnya pada Desember 2011, Suriah menandatangani proposal dari Liga Arab yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan antara pasukan Pemerintah dan demonstran. Namun ternyata konflik sipil di Suriah masih berlanjut yang mengakibatkan Liga Arab menunda misi perdamaian yang akan dilaksanakan di Suriah. Dewan Keamanan PBB kembali melakukan rapat untuk menekan Suriah agar menghentikan konflik sipil yang ada di negara tersebut namun berakhir dengan tidak menghasilkan apapun.

Pada 2012, Konflik sipil di Suriah mencapai Damaskus dan Aleppo yang merupakan kota kedua terpenting di Suriah. Pada mulanya konflik sipil di Suriah merupakan pertempuran yang terjadi antara pasukan pemerintah dan oposisi. Kemudian konflik meluas menjadi antara mayoritas Sunni melawan Syiah yang menjadi minoritas namun menguasai negara (BBC Indonesia, 2018).

Pada tahun 2013 Suriah menandatangani Konvensi Senjata Kimia untuk pelarangan produksi, menimbun dan menggunakan senjata kimia. Namun pada tahun 2014 kelompok oposisi di Suriah menyatakan bahwa stok senjata kimia di Suriah tidak sepenuhnya berada dibawah tanggung jawab Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) dan persediannya dipertahankan. Konflik semakin berkembang karena di tahun yang sama kelompok negara Islam atau ISIS mengumumkan wilayah di Irak dan Suriah yang menjadi daerah kekuasaannya. Kemudian Amerika Serikat meluncurkan serangan udara yang menargetkan

negara Islam tersebut. Pada tahun 2015, kota barat laut Idlib jatuh ke kelompok Islam yang dipimpin afiliasi Al-Qaeda yang dikenal sebagai Front Nusra. Hal ini membuat Bashar Al-Assad mengakui adanya kemunduran bagi militernya. Di tahun yang sama kemudian masuk Rusia untuk mendukung pasukan Bashar Al-Assad untuk melawan pemberontak di Suriah dengan melancarkan serangan udara. Pada tahun 2016, pasukan Turki datang ke Suriah Utara untuk menangkap daerah di sepanjang perbatasan dari kelompok negara Islam tersebut. Disisi lain pemberontak Suriah mengevakuasi lingkungan yang dikuasai pemberontak di Timur Kota Aleppo setelah serangan Pemerintah yang di dukung Rusia. Di tahun 2017, adanya serangan gas saraf di kota Khan Sheikhoun di Provinsi Idlib yang dikuasai oleh pemberontak. Adanya saksi mata yang mengatakan serangan tersebut dilakukan oleh jet Sukhoi Rusia atau Suriah namun Moskow dan Damaskus menyangkal tanggung jawab atas kejadian itu. Dua hari setelahnya Amerika Serikat menembakkan rentetan rudal jelajah ke Suriah sebagai balasan atas serangan yang terjadi di Khan Sheikhoun. Hingga tahun 2018, Konflik sipil di Suriah masih terjadi walaupun telah banyak resolusi konflik yang dibuat untuk menyelesaikan konflik tersebut (BBC Indonesia, 2018).

B. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Sipil di Suriah

Konflik Sipil yang terjadi di Suriah adalah konflik internal yang semakin rumit karena dilatar belakangi beberapa faktor yang terjadi. Faktor-faktor tersebut berasal dari lingkungan internal dan eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor yang terjadi dalam konflik tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama adalah adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi diantara rakyat Suriah. Dibawah kepemimpinan Bashar Al-Assad, perekonomian Suriah mengalami kesenjangan sosial. Hal tersebut disebabkan karena jumlah

pengangguran yang meningkat dan korupsi yang meluas (Arfinggo, 2018). Faktor kedua adalah Bashar Al-Assad adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan yang luas. Hal ini dikarenakan Bashar Al-Assad memiliki kemampuan dalam menguasai sistem politik dan kekuatan militer di Suriah. Hal tersebut membuat rezim Bashar Al-Assad tetap kuat menghadapi tekanan yang terjadi dari oposisi. Kekuatan rezim Bashar Al-Assad membuat keinginan rakyat Suriah untuk menghentikan kekuasaan Presiden Suriah tersebut tidak terlaksana.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang terjadi pertama adalah Bashar Al-Assad merupakan pemimpin negara yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, sehingga Ia mendapatkan dukungan kuat yang berasal dari negara lain seperti Rusia, Cina dan Iran. Hal ini membuat negara-negara tertentu memanfaatkan keadaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya di Suriah. Selain itu dengan adanya campur tangan dari negara lain, konflik sipil di Suriah semakin meluas dan rumit untuk diselesaikan. Faktor kedua adalah karena kelompok oposisi juga mendapatkan dukungan berupa senjata yang berasal dari pihak-pihak lain seperti Amerika Serikat sebagai pihak yang menentang rezim Bashar Al-Assad (Misrawi, 2018).

C. Keterlibatan Rusia dalam Konflik Sipil di Suriah

Setelah adanya persetujuan tersebut maka Rusia resmi memberlakukan kebijakan politik luar negerinya di Suriah. Aktivitas intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia berlanjut tiap tahunnya hingga tahun 2018. Serangan yang dilakukan Rusia untuk mendukung rezim Bashar Al-Assad terbagi menjadi tiga fase kurun waktu.

Fase pertama terjadi pada tahun 2015-2016, seiring dengan keputusan Rusia untuk ikut dalam mendukung rezim Bashar Al-Assad dengan menyetujui permintaan Bashar Al-

Assad untuk memberantas kelompok oposisi terdapat banyak serangan yang dilakukan oleh Rusia. Rusia menggunakan alat-alat militer yang canggih untuk menekan kelompok oposisi di titik-titik yang menjadi basis kelompok tersebut. Rusia menekankan untuk tujuan menstabilkan kekuatan yang sah di Suriah.

Fase kedua tahun 2016 sampai 2017, pada kurun waktu ini Rusia sempat mengalami kegagalan dalam meningkatkan posisinya dihadapan Amerika Serikat. Namun hal tersebut tidak membuat Rusia menarik tentaranya dari Suriah dalam waktu dekat. Moskow malah memperkuat kehadiran militernya di Suriah dengan memfokuskan pangkalan laut di Tartus dan pangkalan udara di Latakia. Selain itu juga mengintensifkan kerja sama dengan Iran dalam upaya untuk membersihkan wilayah-wilayah utama oposisi anti-Assad di Suriah. Kehadiran Rusia yang lebih kuat akan meningkatkan posisi negosiasi Bashar Al-Assad dengan kelompok-kelompok pemberontak.

Fase ketiga tahun 2018, Rusia masih terus memberikan dukungan peralatan militer terhadap Suriah termasuk serangan yang dilakukan oleh Angkatan Udaranya. Begitu pula dengan pasukan Rusia yang secara aktif mendukung Angkatan Darat Suriah dalam mengadakan eksekusi serangan ke wilayah Suriah Selatan. Hal tersebut mengakibatkan kontrol penuh pemerintah Suriah atas provinsi Daraa dan Quneitra. Pada bulan Agustus, Rusia mulai mendirikan pos pengamatan di Quneitra tepatnya di sepanjang zona demiliterisasi yang dipatroli oleh PBB. Kemudian akhir Agustus, Rusia membangun Angkatan Laut terbesar yang pernah ada di Mediterania Timur yang mencakup kapal-kapal penjelajah Marshal Ustinov (Souleimanov, 2018).

Sejak bulan September 2018, beberapa serangan rudal oleh jet F-16 menyerang Suriah Barat. Bersamaan dengan

serangan tersebut, pesawat pengintai Rusia IL-20 kembali ke Pangkalan Udara di Latakia dengan 15 tentara Rusia didalamnya. Namun secara tidak sengaja dijatuhkan oleh pesawat Suriah, insiden tersebut membuat Rusia menyalahkannya kepada Israel yang tidak memberikan pemberitahuan pada Rusia. Setelah adanya insiden tersebut, Rusia mengirimkan sistem rudal pertahanan udara S-300 untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara tempur Suriah.

D. Resolusi Konflik Sipil Di Suriah Yang Telah Dibuat

Konflik Sipil di Suriah mengundang berbagai macam reaksi dari dunia internasional. Ada sebagian pihak yang mendukung rezim Bashar Al-Assad, ada pula pihak yang menentang rezim Bashar Al-Assad dengan memberikan sanksi atas Konflik Sipil yang terjadi di Suriah. Selain itu Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga ikut memberikan respon atas terjadinya Konflik Sipil di Suriah hingga melibatkan pihak-pihak luar tersebut. Berbagai cara untuk menyelesaikan konflik tersebut telah dilaksanakan dari Bashar Al-Assad selaku pemimpin negara Suriah maupun pihak luar yang memiliki otoritas dalam merumuskan resolusi konflik seperti Persatuan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan.

1) Resolusi Konflik yang dilakukan oleh Bashar Al-Assad.

Bashar Al-Assad selaku Presiden dari Suriah telah melakukan serangkaian hal untuk menyelesaikan konflik sipil yang terjadi di negaranya. Dimulai dengan kebijakan dalam negeri yang diterapkan hingga dengan kebijakan luar negeri. Bashar Al-Assad melalui kebijakan dalam negerinya pada tahun 2011 dengan memberikan kenaikan gaji bagi rakyat Suriah.

Kebijakan luar negeri yang dilaksanakan Bashar Al-Assad adalah dengan menjaga hubungan baik dengan aliansi-aliansi Suriah termasuk Rusia,

Cina dan Iran. Sehingga negara-negara tersebut tetap menjadi pihak-pihak yang mendukung adanya rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Pada tahun 2015 Bashar Al-Assad memutuskan untuk mengundang Rusia dalam memberantas kelompok oposisi. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan rezim yang sedang dikuasai Bashar Al-Assad agar tidak diambil alih oleh kelompok oposisi tersebut (BBC News, 2018).

2) *Resolusi Konflik yang dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).*

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara di dunia internasional. Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara anggota yaitu 5 negara anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. 5 negara tetap tersebut adalah Rusia, Amerika Serikat, Cina, Prancis dan Inggris. Kelima negara tersebut memiliki hak istimewa yaitu hak veto yang memungkinkan untuk membatalkan keputusan rancangan resolusi konflik yang dibuat (United Nations, 2019).

Dewan Keamanan PBB mengadakan serangkaian pertemuan untuk membuat resolusi terhadap konflik sipil di Suriah. Dimulai pada tahun 2011 dengan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas sanksi yang akan diberikan terhadap pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad. Pertemuan tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi. Namun resolusi tidak berhasil dibuat karena Rusia dan Cina sepakat untuk memveto resolusi PBB tersebut. Berdasarkan dokumen laporan tentang resolusi konflik di Suriah oleh Dewan Keamanan PBB, berikut merupakan resolusi konflik yang telah dibuat dari tahun 2012 hingga tahun 2018.

Pada tahun 2012, Dewan Keamanan PBB kembali membahas tentang membuat pasukan pengamat untuk membuat resolusi konflik sipil di Suriah. Pasukan tersebut dibentuk untuk meninjau konflik yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan segera. Namun ternyata konflik sipil masih berkelanjutan dan semakin parah. Hal ini membuat Dewan Keamanan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas tentang resolusi konflik di Suriah. Pada akhirnya pertemuan kembali diadakan pada bulan dan tahun yang sama untuk mendirikan United Nations Supervisions Mission in Syria (UNSMIS) yaitu penjaga perdamaian yang dibentuk dibawah PBB sebagai hasil resolusi konflik Dewan Keamanan PBB dalam konflik sipil di Suriah (Security Council of United Nations, 2012). Kemudian pada 20 Juli 2012 Dewan Keamanan PBB membuat resolusi untuk memperpanjang tugas UNSMIS selama 30 hari.

Pada tahun 2013 Dewan Keamanan PBB sepakat untuk mengadopsi dan memverifikasi penghancuran stok senjata kimia di Suriah dan menyerukan diadakannya pembicaraan damai Jenewa II serta mendukung pembentukan badan pemerintahan transisi di Suriah dengan kekuatan eksekutif penuh (Security Council of United Nations, 2013).

Pada tahun bulan 22 Februari 2014, Dewan Keamanan PBB kembali membuat rancangan resolusi untuk Konflik Sipil di Suriah. Resolusi berisi tentang menuntut semua pihak khususnya otoritas Suriah untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan yang melintasi garis konflik. Kemudian pada 14 Juli 2014, resolusi konflik kembali dibuat yang berisi tentang pengesahan akses lintas batas dan

lintas batas untuk PBB serta mitranya untuk memberikan bantuan kemanusiaan di Suriah tanpa persetujuan negara dan membentuk mekanisme pemantauan selama 180 hari (Security Council of United Nations, 2014).

Pada tahun yang sama tepatnya 15 Agustus 2014, resolusi konflik berisi tentang pengecaman perekrutan oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Al-Nusra dari pejuang asing dan mendaftarkan enam orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok itu dibawah rezim sanksi Al-Qaeda. Lalu pada 24 September 2014 resolusi tentang kerangka anti-terorisme diperluas dengan memberlakukan kewajiban pada negara-negara anggota PBB untuk menanggapi ancaman para pejuang teroris asing. Terakhir pada 24 Desember 2014, resolusi konflik yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB berisi tentang pembaharuan wewenang untuk akses kemanusiaan lintas batas hingga 10 Januari 2016 (Security Council of United Nations, 2014).

Pada 12 Februari tahun 2015, resolusi konflik Dewan Keamanan PBB berisi tentang ISIS dan pendanaan ilegal Al-Nusra melalui ekspor minyak, lalu lintas warisan budaya, pembayaran tebusan dan sumbangan eksternal. Sebulan setelahnya pada 6 Maret 2015 dibuat resolusi yang berisi tentang pengutukan penggunaan bahan kimia beracun seperti Klorin tanpa menyalahkan dan menekan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Pada 7 Agustus 2015 kemudian dibuat resolusi yang meminta Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Jenderal Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) yaitu organisasi anti senjata kimia untuk merekomendasikan pendirian dan pengoperasian mekanisme investigasi bersama

PBB dan OPCW untuk menentukan tanggung jawab atas penggunaan senjata kimia di Suriah (Security Council of United Nations, 2015).

Pada tahun yang sama tepatnya 20 November, Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada negara-negara anggota untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan di wilayah Suriah yang berada dibawah kendali ISIS untuk mencegah tindakan teroris yang dilakukan oleh ISIS dan afiliasi Al-Qaeda lainnya. Kemudian pada 18 Desember, Dewan Keamanan mulai membuat resolusi pertama yang lebih spesifik dan eksklusif untuk krisis Suriah berdasarkan suara bulat negara-negara anggota PBB. Lalu pada 22 Desember, Dewan Keamanan memperbaharui otorisasi untuk pengiriman bantuan lintas batas hingga Januari 2017. Resolusi tersebut juga mencakup seruan Dewan Keamanan PBB kepada negara-negara anggotanya untuk mencegah dan menekan segala aktivitas pejuang teroris asing yang masuk dan keluar dari Suriah (Security Council of United Nations, 2015).

Pada 26 Februari 2016 pertemuan untuk membuat rancangan resolusi terhadap konflik sipil di Suriah kembali dibuat. Resolusi berisi tentang dukungan untuk penghentian permusuhan dan seruan untuk dimulainya kembali pembicaraan politik. Selanjutnya pada 31 Oktober, dibuat perpanjangan perintah mekanisme investigasi bersama antara PBB dan OPCW hingga 18 November 2016. Lalu 17 November juga dibuat pembaharuan perintah Mekanisme Ivestigasi Bersama PBB dan OPCW untuk tahun berikutnya. Pada 19 Desember dibuat resolusi yang berisi tuntutan untuk akses PBB dalam memantau evakuasi dari Aleppo. Beberapa hari setelahnya tepatnya 21 Desember, resolusi kembali

dibuat untuk memperbaharui wewenang pengiriman bantuan lintas batas hingga 10 Januari 2018. Lalu pada 31 Desember, Dewan Keamanan membuat resolusi untuk menyambut upaya Rusia dan Turki dalam mengakhiri kekerasan di Suriah dan memulai proses politik pada konflik sipil di Suriah (Security Council of United Nations, 2016).

Kemudian pada tahun 2017 terjadi serangan yang tertuju pada rakyat Suriah dengan menggunakan senjata Kimia dan menewaskan 20 anak-anak dan 52 orang dewasa (BBC Indonesia, 2017). Hal tersebut mengakibatkan Dewan Keamanan PBB membuat draf resolusi yang berisi kutukan terhadap dugaan penggunaan senjata kimia untuk penyerangan di Suriah dan desakan agar Damaskus kooperatif dengan penyidik. Tiga negara Dewan Keamanan PBB yang merekomendasikan draf tersebut yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Prancis meminta agar pemerintah Suriah menaati rekomendasi oleh tim pencari fakta OPCW serta mekanisme tim gabungan PBB-OPCW. Pada 19 Desember resolusi dibuat untuk memperbaharui wewenang pengiriman bantuan lintas batas dan lintas garis di wilayah Suriah (Security Council of United Nations, 2017).

Pada tahun 2018 kembali pertemuan Dewan Keamanan PBB dilaksanakan untuk membuat draf resolusi konflik sipil di Suriah. Rancangan resolusi tersebut berisi tentang tuntutan agar permusuhan di Suriah dihentikan. Kemudian pada 13 Desember, resolusi konflik disiapkan oleh Swedia dan Kuwait yang memperbaharui wewenang untuk akses kemanusiaan lintas batas ke Suriah (Security Council of United Nations, 2018).

Dari penjelasan tentang resolusi-resolusi konflik yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB kebanyakan tidak membuahkan hasil karena Rusia selalu memberikan veto. Hal ini disebabkan karena Rusia sebagai negara mitra strategis Suriah ikut terlibat dalam konflik sipil dengan memberikan bantuan untuk tetap mempertahankan rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Selain itu Rusia juga memiliki kepentingan nasional yang akan dicapai melalui pemberian bantuan terhadap rezim Bashar Al-Assad ditengah konflik sipil yang terus terjadi.